



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULYATI AHMAD
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 53949

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/108 m2 di KOTA MAKASSAR
, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/106 m2 di KOTA MAKASSAR
, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/90 m2 di KOTA MAKASSAR ,
HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 155.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NEW MIO MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 11.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 14.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 86.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 113.464.475

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.554.964.475

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.554.964.475

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.